

**KEPEMIMPINAN ULAMA DALAM RESOLUSI KONFLIK
PEMBANGUNAN WADUK KEDUNG OMBO TAHUN 1985-2002**



Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Magister Humaniora (M. Hum)

Oleh:

Muhammad Fairus Kadomi

NIM. 20201021009

**PROGRAM STUDI MAGISTER SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Muhammad Fairus Kadomi

NIM : 20201021009

Judul : Kepemimpinan Ulama' dalam resolusi Konflik Pembangunan Waduk Kedung Ombo Tahun 1985-2002

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Program Magistes Sejarah Peradaban Islam (SPI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan sebagai syarat memperoleh gelar Magister dalam bidang Sejarah Peradaban Islam (SPI). Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Desember 2022

Pembimbing,

Dr. Badrun, M.Si.

NIP. 19631116 199203 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2441/Un.02/DA/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : Kepemimpinan Ulama dalam Resolusi Konflik Pembangunan Waduk Kedung Ombo Tahun 1985-2002

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAIRUS KADOMI, S.Hum
Nomor Induk Mahasiswa : 20201021009
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Badrun, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 63abd946001eb



Penguji I

Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 63abf07f827e2



Penguji II

Dr. Sujadi, M.A.

SIGNED

Valid ID: 63abd408ef66b



Yogyakarta, 15 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Dr. Muhammad Wildan, M.A.

SIGNED

Valid ID: 63abe4f32e1e0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fairus Kadomi
NIM : 20201021009
Program Studi : Magister Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya

menyatakan bahwa tesis berjudul “Kepemimpinan Ulama’ dalam Resolusi Konflik Pembangunan Waduk Kedung Ombo Tahun 1985-2002” adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang digunakan untuk bahan rujukan dan telah dikutip sesuai dengan kaidah ilmiah dan tercantum pada daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fairus Kadomi

NIM. 20201021009

MOTTO

“Hormati Orang Tua dan Gurumu”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini Saya Persembahkan Kepada Keluarga Saya Tercinta

Khususnya Ayah, Alm. K.H. Nasafi (1952-2021),

**Kepada Alm. K.H. Mahfudz Ridwan, K.H. Abdurrahman Wahid, dan K.H.
Hamam Ja'far**

Al Fatihah...

Kepada Warga Kedung Ombo di tanah Serang

Terima Kasih.



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ABSTRAK

Waduk Kedung Ombo merupakan proyek besar yang mulai direncanakan di tahun 1969 dan diresmikan pada tahun 1991 pada masa jabatan presiden Soeharto. Masalah pembebasan tanah, ganti rugi dan konflik antara warga terdampak pembangunan Kedung Ombo terangkat menjadi isu nasional bahkan internasional. Dalam dinamika pengelolaan konflik, muncul beberapa ulama seperti K.H. Hammam Dja'far, K.H. Mahfudz Ridwan dan K.H. Abdurrahman Wahid. Hal ini terjadi karena relasi antara Ulama dengan LSM, Tokoh Lintas Iman dan peristiwa yang terangkat ke publik karena isu hak asasi manusia dan konflik agraria. Ulama berkontribusi dalam resolusi konflik dan ditunjukkan melalui kepemimpinannya di kasus Kedung Ombo.

Penelitian ini mengenai sejarah sosial, maka digunakan pendekatan sosiologi untuk mengkaji konflik dan menjelaskan timbulnya konflik, serta menganalisis kepemimpinan kharismatik yang ditunjukkan ulama dalam resolusi konflik Kedung Ombo. Teori yang digunakan adalah teori konflik Simon Fisher dan kepemimpinan kharismatik Max Webber. Prosedur dalam penelitian ini berupa heuristik meliputi pengumpulan sumber; kritik sumber meliputi kritik intern dan ekstern; interpretasi berupa klasifikasi dan mencari hubungan kausalitas; serta eksplanasi sejarah untuk penulisan sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, aktivitas sosial keagamaan masyarakat Kedung Ombo sebelum pembangunan waduk masih mempertahankan tradisi dan nilai-nilai lokal. Kepercayaan setempat masih ada kaitannya dengan kepercayaan mitologi mengenai zaman kemakmuran, terjadinya Waduk Kedung Ombo, dan keyakinan pengulangan sejarah tentang geger serang yang ketiga; *Kedua*, dalam proses pembangunan Waduk Kedung Ombo, terjadi konflik antara pemerintah setempat dengan warga yang terjadi pada tahun 1982-1989, sehingga berdampak dalam kelangsungan hidup warga Kedung Ombo. Konflik timbul karena tidak adanya kesepakatan atau proses musyawarah dalam tahap proses pembangunan seperti tahap sosialisasi, ganti rugi, dan penggenangan yang terlalu cepat; *Ketiga*, ulama melakukan resolusi konflik dikarenakan adanya kepentingan untuk masyarakat Kedung Ombo dan dalam hal mengkritik kebijakan orde baru. Dalam upaya resolusi konflik, dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu penciptaan perdamaian (tahun 1989), menggalang perdamaian (tahun 1989), dan membina perdamaian (tahun 1989-2002). Kehadiran ulama dalam upaya resolusi konflik di Kedung Ombo tercermin melalui fungsi-fungsi kepemimpinan yang dijalankan, seperti fungsi mobilisasi untuk mendorong terjadinya perubahan dari sisi sikap warga Kedung Ombo, fungsi mediasi dalam penanganan konflik dan ketegangan antar pihak secara langsung, dan fungsi motivasi dari ketiga ulama yang fokus terhadap pendampingan masyarakat, penguatan psikologis warga, serta keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Kharismatik, Resolusi Konflik, Konflik Pembangunan.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah Sang Maha Kuasa dan berkat-Nya diberikan kesehatan dan kemerdekaan berfikir.

Atas segala nikmat, maghfirah Allah SWT, naskah tesis ini dapat diselesaikan dengan keadaan yang baik, dari sisi penulis dengan keadaan jasmani hingga rohani yang luar biasa baik serta dikelilingi orang-orang yang baik pula. Alhamdulillah, penelitian tentang “Kepemimpinan Ulama dalam Resolusi Konflik Pembangunan Waduk Kedung Ombo tahun 1985-2002” mampu terselesaikan dengan mencurahkan segala kemampuan semaksimal mungkin.

Terima kasih, kata yang pantas untuk segala pihak yang terlibat sehingga penelitian ini mampu diselesaikan. Demikian, saya ucapkan terimakasih, *Jazakumullah Jaza'*. Terutama, secara khusus saya ucapkan kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A yang telah memberikan ilmu dan inspirasi selama belajar di kampus UIN Sunan Kalijaga.
2. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Dr. Muhammad Wildan, M.A. atas motivasi serta inspirasi penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Ketua Jurusan Magister Sejarah Peradaban Islam (SPI) UIN Sunan Kalijaga, Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag, beserta jajarannya serta seluruh dosen homebase SPI Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.

4. Dosen Pembimbing, Dr. Badrun, M. Si, yang telah memberikan semangat, perhatian, saran, ilmu baru dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga tanpa terkecuali.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan dalam tahapan penulisan atau penelitian, sehingga kritik dan saran akan sangat berarti. Besar harapan bahwa hasil penelitian ini mampu memberikan inspirasi dan manfaat bagi kalangan peneliti/akademisi sebagai sumbangsih keilmuan kesejarahan di Indonesia, aamin.

Yogyakarta, 1 Desember 2022



Muhammad Fairus Kadomi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS PEMBIMBING	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	28
H. Jadwal Penelitian	29

BAB II: AKTIVITAS SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT

KEDUNG OMBO SEBELUM PEMBANGUNAN WADUK	31
A. Kondisi Geografis, Penduduk, Pendidikan dan Keagamaan	31
1. Letak Geografis	31
2. Penduduk	33
3. Pendidikan	36
4. Keagamaan	37
B. Sejarah Desa dan Mitologi Kedung Ombo	39
1. Tokoh Legendaris Kedung Ombo	40
a. Nyi Ageng Serang	40
b. Tumenggung Prawirodigdoyo	41
c. Pangeran Samudro	42
d. Eyang Serangan Kudawirangin	43
e. Kyai Tlingsing	44
f. Eyang Sodo	45
2. Legenda Terjadinya Kedung Ombo	46
3. Pemaknaan Mitologi oleh Masyarakat Kedung Ombo	47
C. Stratifikasi Sosial Masyarakat Kedung Ombo	52
D. Dasar Perencanaan Pembangunan Waduk Kedung Ombo	56

BAB III: KONFLIK DALAM PEMBANGUNAN WADUK KEDUNG

OMBO	68
A. Proses Pembangunan Waduk Kedung Ombo	68

1. Tahap Pembangunan Fisik (1981-1989)	70
2. Tahap Sosialisasi (1982-1985)	71
3. Tahap Pembebasan Tanah (1985-1989)	74
4. Kebijakan Transmigrasi (1983-1988)	77
5. Kebijakan Relokasi (1988-1989 dan 2002)	80
6. Tahap Penggenangan (1989)	85
7. Tahap Peresmian (1991)	92
B. Timbulnya Konflik dalam Pembangunan Waduk Kedung Ombo	93
1. Mempermasalahkan Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan (1985-1989)	95
2. Mempersoalkan Ganti Rugi (1985-1989)	98
3. Penolakan Transmigrasi (1986)	101
4. Penolakan Relokasi Kayen (1988-1989)	102
5. Mempertahankan Tanah Leluhur (1989)	105
6.. Membentuk Kelompok Penyadar Masyarakat (1989-2001)	107
C. Penyebab dan Dampak Konflik	111
D. Bantuan dalam Konflik	121
1. LSM (1985)	121
2. KSKPKO (1989)	123
3. Kelompok Rama Mangunwijaya (1989)	127
4. ICMi (1991)	129
E. Ulama dan Konflik di Kedung Ombo	131

BAB IV: KEPEMIMPINAN ULAMA DALAM RESOLUSI KONFLIK

KEDUNG OMBO (1985-2002)	136
A. Kepentingan Ulama di Kedung Ombo	136
1. Kepentingan untuk Masyarakat Kedung Ombo (1989).....	137
2. Kepentingan untuk Mengkritik Kebijakan Pemerintah (1989- 1992)	140
B. Kontribusi Ulama dalam Resolusi Konflik	144
1. K.H. Hammam Dja'far (1989)	144
2. K.H. Mahfudz Ridwan (1989-2002)	152
3. K.H. Abdurrahman Wahid (1989-2002)	157
C. Ulama dalam Menjalankan Fungsi Kepemimpinan	165
1. Fungsi Mobilisasi	165
2. Fungsi Mediasi	170
3. Fungsi Motivasi	175
BAB V: PENUTUP	185
A. Kesimpulan	185
B. Saran	189
DAFTAR PUSTAKA	190
LAMPIRAN-LAMPIRAN	202
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	224

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tentang Presentase Mata Pencaharian Masyarakat Desa Terkena Dampak Waduk Kedung Ombo di 4 Kecamatan	34
Tabel 2.2 Tentang Kemampuan Baca Tulis Klien LBH Yogyakarta di Kecamatan Kemusu	36
Tabel 2.3 Tentang Potensi Sumber Daya Air Jratunseluna.....	61
Tabel 2.4 Tentang Daerah Irigasi Potensial Jratunseluna	62
Tabel 2.5 Tentang Daerah Terdampak Pembangunan Waduk Kedung Ombo.....	65
Tabel 3.1 Tentang Besaran Sumber Dana Pembiayaan Pembangunan Waduk Kedung Ombo	69
Tabel 3.2 Tentang Jumlah KK dan Arah Perpindahan Penduduk Kecamatan Kemusu dan Wilayah Penduduk Kedung Ombo lainnya	89

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPKH	: Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Cm	: Centimeter
Danramil	: Komando Rayon Militer
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ET	: Eks Tapol
FPRK	: Forum Perjuangan Rakyat Kedung Ombo
G. 30 S/PKI	: Gerakan 30 September / PKI
Ha	: Hektare
HAM	: Hak Asasi Manusia
IBRD	: International Bank for Reconstruction and Development
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
IGGI	: Interr-Government Group on Indonesia
IMBAS	: Initiative for Human Right in Asean States
INFID	: International NGO Forum on Indonesian Development
INGI	: International NGO's Forum on Indonesia
IPM	: Institute Pabelan Muntilan

IWGIA	: International Work Group for Indigenus Affairs
JATAN	: Japan Tropical Forest Action Group
Jratunseluna	: Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juana
Kakansopol	: Kepala Kantor Bidang Sosial Politik
Kapolda	: Kepala Kepolisian Daerah
KK	: Kartu Keluarga
Korwil	: Koordinator Wilayah
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KSBH	: Kelompok Studi dan Badan Hukum
KSKPKO	: Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Kedung Ombo
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
Letjen	: Letnan Jenderal
LPHAM	: Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung
Menteri PU	: Menteri Pekerjaan Umum
MM	: Milimeter
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MW	: Mega Watt
NEDECO	: Netherland Engineering Consultants

NGO	: Non-Government Organization
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Ornop	: Organisasi Non Pemerintah
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PMKB	: Paguyuban Masyarakat Kemusu Boyolali
Polres	: Kepolisian Resor
Polsek	: Kepolisian Sektor
PWKO	: Paguyuban Warga Kedung Ombo
Rn	: Raden Ngabehi
SD	: Sekolah Dasar
SK	: Surat Keputusan
SMEC	: Snowy Mountain Engineering Cooperation
Tap MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UKSW	: Universitas Kristen Satya Wacana
Kelompencapir	: Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pirswawan
USD	: Dollar Amerika Serikat
YAPHI	: Yayasan Pelayanan Hukum Indonesia
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Orde Baru dapat diidentikkan dengan ciri khas pembangunan, kendati di sisi lain juga diidentikkan dengan citra sentralistik, otoriter dan kurang mengimplementasikan nilai demokrasi. Namun dalam hal pembangunan fisik, Orde Baru harus diakui melakukan pekerjaan pembangunan yang diprioritaskan. Keberhasilan pembangunan fisik dan ekonomi pada masa itu belum diimbangi dengan adanya iklim demokratisasi, keterbukaan, kebebasan berkumpul, kebebasan berfikir dan kebebasan mengeluarkan pendapat.¹

Sebagian besar program pembangunan dilakukan dengan sistem *top-down planning* sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat, karena telah direncanakan, dilaksanakan, diatur, dan dikelola negara. Oleh sebab itu, dampak bagi sebagian masyarakat yang merasa dirugikan, mereka tidak kuasa untuk menolak kemauan penguasa. Berbagai proyek pembangunan yang menyertakan pembebasan tanah sebagai salah satu proses di dalamnya sering berakhir dengan penggusuran tanah atau bangunan. Meski terdapat perlawanan rakyat, namun pada akhirnya perlawanan tersebut terkesan percuma. Kasus Kedung Ombo merupakan salah satu dari sekian banyak

¹ Isdiyanto, et.al, *Menyelami Kedung Ombo, vol.1*, (Semarang: Kelompok Diskusi Wartawan, 2003), Hlm 3.

proyek pembangunan di masa Orde Baru yang berakhir dengan pengusuran tanah atau bangunan milik penduduk setempat, ketika belum semua penduduk Kedung Ombo menyepakati nilai ganti rugi.²

Waduk Kedung Ombo merupakan sebuah proyek pembangunan yang direncanakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Perencanaan tersebut dirasa penting bagi kesejahteraan rakyat terutama pada aspek ekonomi, sumber tenaga listrik, pengairan sawah dan beberapa sektor pariwisata. Pembangunan Waduk Kedung Ombo ini dibiayai USD 156 juta dari Bank Dunia, USD 25,2 juta dari bank Exim Jepang, dan APBN, dimulai pada tahun 1985 hingga tahun 1989. Pelaksanaan program pembangunan Waduk Kedung Ombo ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan melakukan studi kelayakan pada tahun 1976, pembebasan tanah pada tahun 1982, dan pembangunan fisik pada tahun 1985.³ Akan tetapi, hal ini bukanlah mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan program-program pembangunan Waduk Kedung Ombo. Program ini memerlukan lokasi sekitar 9.623 hektare. Oleh sebab itu, perlu pembebasan 5.286 KK yang bermukim di 37 desa, 7 kecamatan dan 3 kabupaten yang harus dilakukan oleh pemerintah.⁴

Pembangunan bendungan serta proyek-proyek irigasi serupa selama masa Orde Baru seringkali mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang tidak bersedia dengan adanya pembangunan, karena dengan alasan akan terjadi pengusuran dan dibeli tanahnya begitu saja. Selain Waduk Kedung Ombo, lima bendungan lain di Jawa yang mendapatkan perlawanan dari warga adalah

² Ibid., Hlm 3-5.

³ Ibid., Hlm 9.

⁴ Ibid., Hlm 7.

bendungan Jipang di Jawa Timur, bendungan Gajah Mungkur dan Mrica di Jawa Tengah, serta bendungan Saguling dan Cirata di Jawa Barat.⁵

Studi tentang kepemimpinan ulama terhadap kondisi sosial masyarakat sebetulnya bermuara pada hal apa yang mampu dilakukan oleh umat Islam terhadap kondisi sosial yang terjadi.

Dalam konteks ini, pembangunan dilakukan berasal dari program pemerintah untuk mewujudkan waduk atau irigasi guna mengatasi permasalahan terkait beberapa aspek seperti kekeringan, irigasi pertanian, mengatasi banjir dan lain-lain. Masyarakat yang kurang mampu memahami kondisi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah seakan-akan terlalu menekan pada rakyatnya. Hal ini kemudian menjadikan rakyat kurang setuju atas kebijakan yang diambil. Pemerintah melakukan komunikasi secara tidak menyeluruh, dan hanya menginstruksikan perangkat desa agar mampu mengatasi permasalahan ketidaksanggupan dan biaya ganti rugi tanah. Dalam proses pembangunan, muncul gerakan sosial warga Kedungpring atas kebijakan pembangunan Waduk Kedung Ombo.

Peristiwa pembangunan Waduk Kedung Ombo ini melibatkan banyak unsur, seperti LSM, beberapa Ormas, rakyat kecil, sejumlah tokoh agama baik Islam atau non-Islam, dan juga unsur dari mahasiswa.⁶ Ulama yang saat ini peneliti bahas merupakan unsur yang penting, dan nampaknya belum ada yang fokus membahas dalam konteks pembangunan waduk Kedung Ombo. Jadi,

⁵Ardhi Setyawan Novianti, *Dampak Pembangunan Waduk Kedung Ombo terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani di Kabupaten Grobogan Tahun 1989-1998*, (Semarang: Unnes, 2019), Hlm 4.

⁶ Ibid., Hlm 8-9.

bagaimana kepemimpinan ulama atau tokoh agama Islam di peristiwa pembangunan waduk Kedung Ombo ini penting untuk diteliti.

Beberapa studi tentang kepemimpinan ulama dalam protes sosial masih perlu dilakukan. Umat Islam yang terdiri dari pemuka atau pemimpin agama yang biasa disebut kyai atau ulama kerap sekali dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki ilmu keagamaan yang tinggi atau hanya tinggal di Pondok Pesantren saja.

Beberapa Ulama yang memiliki peran penting diantaranya adalah K.H. Hammam Ja'far pengasuh Pondok Pesantren Pabelan Magelang yang mendampingi para warga yang masih bertahan di lokasi, dan membangun sekolah darurat untuk sekitar 3.500 anak-anak, serta membangun sarana seperti rakit untuk transportasi warga yang sebagian desanya sudah menjadi danau. Selain itu terdapat K.H. Mahfudz Ridwan yang melakukan mediasi dengan penduduk sekitar Kedung Ombo, beberapa informasi menyebutkan bahwa ulama menjadi konseptor agar rakyat dan pemerintah sama-sama *legowo* atau saling mengerti akan kondisi yang dihadapi. Sebetulnya, para ulama lokal memiliki peran penting dan advokasinya demi umat disana. Akan tetapi hal tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan perpecahan yang lebih. Selain itu, K.H. Abdurrahman Wahid juga pernah mengambil sikap atas dibangunnya Waduk Kedung Ombo.

Oleh sebab itu, dari pengamatan peneliti, penting untuk mengungkap sejauh apa Ulama di atas muncul dalam melakukan upaya resolusi konflik pada

konteks pembangunan waduk yang erat kaitannya dengan pembangkangan dan pergerakan masyarakat merespons dibangunnya Waduk Kedung Ombo.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Bagian selanjutnya adalah memberikan penjelasan mengenai pembatasan dan perumusan masalah. Pembatasan dimaksudkan agar penelitian mampu menjelaskan secara tepat dari segi luasan tempat dan batasan waktu. Penelitian ini bermaksud untuk membahas kepemimpinan ulama terkait dengan pembangunan waduk Kedung Ombo. Tempat yang dilakukan pada penelitian ini adalah di Kemusu, Boyolali karena warga yang pindah dari tanah yang sekarang menjadi Waduk Kedung Ombo sebagian besar ditempatkan di Kemusu. Batasan waktu mengenai penelitian dilakukan pada tahun 1985 mengingat terjadinya pembangunan awal, dan tahun 2002 dikarenakan pemindahahan atau relokasi penduduk berakhir pada tahun tersebut.

Berdasarkan batasan dan penjabaran dari latar belakang, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat sekitar Kedung Ombo sebelum dibangunnya waduk?
2. Bagaimana proses pembangunan Waduk Kedung Ombo dan timbulnya konflik dalam pembangunan waduk Kedung Ombo?
3. Mengapa ulama melakukan resolusi konflik pembangunan Waduk Kedung Ombo dan faktor-faktor apakah yang membentuk tipe kepemimpinan masing-masing ulama tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji eksistensi pemimpin agama dalam memberikan solusi terhadap problem sosial sebagai bagian dari edukasi dan advokasi kehidupan masyarakat.
2. Mempelajari konflik agraria dan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.
3. Menyelidiki pola dan hubungan ulama dengan *stakeholder* dalam memberikan solusi ketika terdapat konflik di masyarakat.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memperkaya pengetahuan tentang kepemimpinan ulama lokal di Indonesia.
2. Menambah literatur tentang sejarah Islam dan konflik yang berkembang di masyarakat.
3. Sebagai bahan informasi, data dan sumber baru mengenai kesejarahan ulama dalam menghadapi konflik pembangunan di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Pertama, Karya Tesis *Bedhahing Serang Kaping Telu Ing Kedungpring: Gerakan Sosial Masyarakat Seputar Waduk Kedung Ombo* karya Panis Dhbi Salam dari alumni Ilmu Sejarah Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pembahasan karya di atas adalah gerakan sosial masyarakat Kedungpring yang

muncul dan disebabkan oleh pelaksanaan pembebasan tanah serta faktor kultural warga. Bagi warga Kedungpring, tak ada jalan lain kecuali melakukan Gerakan sosial. Tujuan dari gerakan ini mulanya adalah menghendaki pembangunan waduk Kedung Ombo dihentikan. Setelah tujuan tersebut tidak tercapai, maka tujuan gerakan mereka berikutnya adalah mendapatkan relokasi di sekitar waduk, dengan alasan agar tetap bisa dekat dengan leluhurnya dan bisa ikut serta menikmati hasil pembangunan waduk Kedung Ombo.

Kedua, Penelitian Tesis yang dilakukan oleh J. Mardimin dari alumnus Universitas Gajah Mada program studi Sosiologi dengan judul *Perlawanan Masyarakat Kedung Ombo: Studi tentang Bentuk-bentuk Resistensi Masyarakat Kedung Ombo terhadap Represi Negara Atas Pembangunan Waduk Kedung Ombo*. Karya di atas menunjukkan bentuk perlawanan-perlawanan masyarakat Kedung Ombo terhadap represi negara terkait dengan pembangunan waduk raksasa di daerah tersebut. Perlawanan-perlawanan masyarakat sekitar Kedung Ombo dilakukan oleh masyarakat biasa. Permasalahan di dalam pembangunan waduk Kedung Ombo tergolong banyak, yakni dibuktikan dengan meninggalkan kepedihan bagi para korban dan menguras banyak waktu dalam penyelesaian, jika dihitung dari studi kelayakan mulai tahun 1969 hingga tahun 2004, selama kurang lebih 35 tahun masalah Kedung Ombo belum secara keseluruhan terselesaikan.

Ketiga, Penelitian dari Jurnal terbitan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial yang ditulis oleh Gunanto Surjono berjudul *Perubahan Sosial Masyarakat Segitiga Hilir*

Dampak Pembangunan Waduk Kedung Ombo. Penelitian tersebut membahas mengenai perubahan sosial yang terjadi dalam aspek ekonomi lokal, sistem kekeluargaan, hubungan dengan pemerintahan setempat, dan kepercayaan yang dianutnya setelah perubahan alam lingkungan yang berlangsung selama 25 tahun.

Keempat, Penelitian Disertasi dari Arief Patramijaya di University of Essex Inggris tahun 2002 yang berjudul “*A Critical Contextual Human Rights Analysis of Kedung Ombo Large Dam Project in Indonesia*”. Penelitian ini menekankan pembahasan mengenai analisis kasus Kedung Ombo dalam sudut pandang hukum hak asasi manusia level nasional dan internasional. Tujuannya adalah guna memberikan wawasan tentang hukum yang berlaku di kasus yang serupa dan mekanisme hukum yang tersedia bagi orang yang mengalami kasus serupa. Penelitian ini juga membahas mengenai kemungkinan dalam hal penegakan tanggung jawab negara dan non negara dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam proyek Kedung Ombo.

Kelima, Tulisan yang bersifat jurnalistik juga pernah diterbitkan dengan judul *Menyelami Kedung Ombo*. Buku karangan Isdiyanto dan kawan-kawannya ini mengungkapkan dinamika situasi warga sekitar waduk Kedung Ombo. Sifat tulisan yang berupa keadaan nyata pada konteks warga Kedung Ombo ini menggambarkan dampak dari adanya pembangunan waduk.

Keenam, Penelitian Disertasi dari George Aditjondro di Cornell University New York tahun 1993 yang berjudul “*The Media as Development -Textbook- A Case Study On Information Distortion in the Debate About the Social Impact of*

an Indonesian Dam". Penelitian tersebut berisi analisis media yang muncul dalam proses proyek bendungan Kedung Ombo. Beberapa analisisnya ialah mengenai strategi media yang diterapkan oleh pengkritik proyek bendungan, dan beberapa informasi yang tidak dilaporkan terkait proyek Kedung Ombo.

Ketujuh, Buku yang berjudul "*Seputar Kedung Ombo*" yang ditulis oleh Stanley (Yosep Adi Prasetya) di Salatiga terbitan dari hasil kerjasama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dengan INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*) pada tahun 1990. Buku ini bersumber dari hasil pengamatan langsung Stanley ketika aktif dalam KSKPKO (Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Kedung Ombo) dan Yayasan Geni di UKSW. Data diambil melalui pengamatan langsung, catatan-catatan yang ia buat, koran-koran terkait peristiwa Kedung Ombo dan cerita-cerita tentang sejarah dan legenda di Kedung Ombo melalui penduduk di sana. Ciri khas dari penelitian ini adalah penggunaan metode "pengamatan terlibat" atau *participant observation* yang mana telah berusaha untuk mengungkap rekaman jejak beberapa sudut pandang "orang kampus" dan "orang kampung" di Indonesia, dalam hal ini terkait pembangunan bendungan serba guna di Kedung Ombo Jawa Tengah.

Beberapa penelitian yang sudah ada memberikan informasi seputar pembangunan waduk Kedung Ombo dan adanya gerakan sosial yang terjadi. Namun penelitian tentang adanya kontribusi atau keberadaan ulama dalam dinamika pembangunan waduk dan dinamika gerakan sosial yang terjadi belum dibahas sama sekali. Sifat penelitian ini adalah penelitian lanjutan dari yang

sudah ada, akan tetapi terdapat perbedaan dari sisi fokus pembahasannya. Penelitian yang akan dilakukan ini adalah adanya kepemimpinan ulama yang memiliki kontribusi dalam proses pembangunan waduk Kedung Ombo, baik dari sisi protes sosial yang terjadi ataupun dari sisi advokasi untuk memperjuangkan hak dari warga Kedung Ombo.

Fokus pembahasan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek umum mengenai pembangunan dan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan saja. Keberadaan Islam yang diwakili oleh tokoh agama Islam semestinya harus dimunculkan. Dikarenakan tokoh agama Islam memiliki posisi sentral dalam dinamika peristiwa ini, maka penelitian lanjutan yang membahas tentang keberadaan kepemimpinan ulama akan menjadi penelitian baru yang akan memberikan wawasan baru terkait sejarah Islam, dan pada khususnya sejarah sosial Islam.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini adalah penelitian sejarah sosial, sehingga dalam proses penelitian ini dibutuhkan pendekatan sosiologi dalam mengungkap fenomena kepemimpinan ulama. Kajian sosial yang berbasis Islam dilakukan oleh Kuntowijoyo mengenai Ilmu Sosial Profetik. Kajian menurutnya adalah upaya mengilmukan Islam dalam melihat fenomena sosial. Pengilmuan Islam yang dimaksud adalah upaya membangun disiplin keilmuan yang utuh dalam

mengkaji fenomena kemasyarakatan dari Islam itu sendiri.⁷ Proses pembangunan proyek Kedung Ombo memang melibatkan beberapa lapisan masyarakat, baik di daerah lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Oleh sebab itu, kajian sejarah ini membutuhkan pendekatan ilmu sosial sebagai ilmu bantu dalam menjelaskan penetapan objek, struktur permasalahan, dan mengarahkan metode analisis dalam menjelaskan objek sejarah. Pendekatan ilmu sosial yang relevan dengan topik peneliti adalah sosiologi.

Corak sosiologis dalam kajian sejarah, familiar dengan istilah sejarah sosiologis (*sociological history*). Sejarah analitis dan sejarah struktural hanya dapat dikaji dan ditulis dengan baik jika pendekatan sosiologis khususnya dan pendekatan ilmu sosial pada umumnya diterapkan. Perbedaan sejarah sosiologis dengan sejarah sosial tidak akan signifikan terjadi jika bentuk uraian sejarah sosiologis memuat diskripsi yang memuat banyak fakta sosial yang dirumuskan dari istilah-istilah ilmiah dari sosiologi dan dengan penggunaan retorik yang tidak terpengaruhi oleh struktur analitis, melainkan lebih kepada uraian diskursif.⁸ Namun, perbedaan tentunya ada dalam kajian sejarah dan sosiologi sebagai pembatas atau pembeda, yakni sosiologi mengutamakan aspek generalisasi struktur masyarakat, sedangkan sejarah menekankan pada keunikan dan perubahan-perubahan masyarakat dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, maksud dari peneliti ialah menggunakan pendekatan sosiologi dalam menggambarkan tentang peristiwa sejarah dalam segi-segi sosialnya.

⁷ Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), Hlm 23.

⁸ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), Hlm 165-166.

Pendekatan sosiologi digunakan untuk memperoleh fakta-fakta sejarah terkait dengan kondisi geografis, keadaan penduduk Waduk Kedung Ombo dari sisi sosial, budaya hingga keagamaan, melihat alasan dari pemerintah dalam hal pembangunan waduk dan respons masyarakatnya, serta melihat hubungan sosial-politik ulama dalam kepemimpinannya di konflik yang terjadi di Kedung Ombo.

Tidak hanya itu saja, pendekatan sosiologi juga telah memberikan pandangan bahwa konflik yang terjadi merupakan suatu bentuk proses sosial disosiatif, yang ternyata berasal dari perbedaan, kesenjangan dan kelangkaan kekuasaan, perbedaan atau kelangkaan posisi sosial dan sumber daya atau karena disebabkan oleh sistem nilai dan penilaian yang berbeda secara ekstrim.⁹ Konflik sosial yang terjadi bukannya tidak ada solusi. Menurut Hendropuspito dalam tulisan Eko Handayono tentang Sosiologi Politik, terdapat 5 cara untuk menyelesaikan konflik, yakni konsiliasi, mediasi, arbitasi, paksaan, pengendoran.¹⁰ Berbeda halnya dengan Simon Fisher, penjelasan lebih lanjut mengenai pendekatan untuk mengelola konflik dijelaskan lebih rinci, seperti: pencegahan konflik, penyelesaian konflik, pengelolaan konflik, resolusi konflik dan transformasi konflik.¹¹ Peneliti menggunakan resolusi konflik dari bacaan ilmu sosiologi sebagai cara pandang lebih dalam mengenai penelitian ini.

⁹ Eko Handayono, *Sosiologi Politik*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), Hlm 54.

¹⁰ Ibid., Hlm 56.

¹¹ Simon Fisher dkk, *Terj. Mengelola Konflik 'Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak'*, (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001), Hlm 7.

Menurut Ritzer, sebuah kekuasaan atau kepemimpinan merupakan peluang bahwa sesuatu bisa terjadi sehingga suatu perintah akan mampu dipenuhi beberapa kelompok orang.¹² Dalam analisis sosiologis, Hassanatul Jannah menyebutkan bahwa kekuasaan kyai atau ulama diorientasikan untuk menggalang perubahan sosial yang mampu memperkokoh posisi sosialnya di masyarakat. Kyai atau ulama harus berada dan membela tradisi kultural agama, dan jika kehilangan kekuatannya akibat dari berbagai strategi-strategi politik maka otoritas kyai menjadi luntur.¹³ Adanya kesadaran bahwa perjuangan kyai yang berangkat dari otoritas kultural dan agama inilah yang memberikan sudut pandang bagi peneliti untuk memahami secara struktur sosial melalui kharisma atau kewibaannya yang ditunjukkan melalui sebuah sikap terhadap konflik Kedung Ombo.

Ilmu sejarah adalah ilmu yang bersifat empiris, maka sangat penting untuk berpangkal pada fakta-fakta yang tersaring dari sumber sejarah, sedangkan teori dan konsep dijadikan sebagai alat untuk mempermudah analisis dan sintesis sejarah. Pendirian pokok pada penelitian ini adalah berdasarkan kumunculan ulama yang memiliki potensi untuk menjadi kontributor dari sekian upaya yang dilakukan oleh beberapa unsur seperti LSM, ormas, mahasiswa, rakyat dan lainnya. Oleh karena itu, paradigma yang dibangun adalah kepemimpinan ulama memiliki latar belakang, sebab khusus serta sikap pengelolaan konflik yang berbeda di banding dengan pihak luar lain dalam

¹² Ach Riadi, *Kyai dan Perubahan Sosial di Madura 1935-1955*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), Hlm 14.

¹³ Hannatul Jannah, *Kyai, Perubahan Sosial dan Dinamika Politik Kekuasaani*, (Pamekasan: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, 2015), Hlm 175.

konflik yang terjadi antara pihak pemangku kepentingan dengan warga lokal atas adanya kebijakan pemerintah untuk membangun Waduk Kedung Ombo. Paradigma ini dikembangkan berdasarkan konsep-konsep pokok di bawah ini:

1. Kebijakan Pembangunan

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Secara lebih khusus, kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mengarahkan tindakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kebijakan menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.¹⁴ Penulis dapat menyimpulkan bahwa arti dari kebijakan sebagai sebuah rangkaian rencana atau keputusan untuk kemudian dijadikan acuan tindakan yang dimanifestasikan dalam bentuk program-program terkait persoalan tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Definisi pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.¹⁵ Menurut Prof Denis Goulet, minimal ada 3 komponen dasar atau tata nilai yang seharusnya bisa memahami arti pembangunan, yakni berkaitan dengan nafkah hidup, harga diri menjadi

¹⁴ George A Steiner, dan John B. Minier, *Kebijakan dan Strategi Manajemen edisi Kedua*, (Jakarta: Eirlangga, 1997), Hlm 22.

¹⁵ Bachrawi, Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), Hlm 8.

manusia, dan sasaran pembangunan.¹⁶ Dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kebijakan pembangunan dapat diartikan sebagai garis haluan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dengan target-target tertentu demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik.

2. Protes Sosial

Secara substansial aksi kolektif sebenarnya tidak berbeda dengan protes sosial. Keduanya merupakan bentuk tindakan bersama massa untuk menentang pemegang kekuasaan. Sydney Tarrow mendefinisikan aksi kolektif sebagai perlawanan bersama oleh rakyat dengan upaya bersama dan solidaritas dalam interaksi yang berlanjut dengan elite, musuh-musuhnya dan pemegang kekuasaan. Aksi kolektif dapat hadir dalam bentuk asosisasi kepentingan, gerakan protes sosial, pemberontakan, pembangkangan atau revolusi. Dibanding dengan aksi kolektif, protes sosial tampaknya lebih membumi dalam konteks masyarakat lokal Indonesia. Protes adalah gerakan massa yang lebih jelas yang tidak semata-mata karena tidak puas atau emosi untuk merusak tatanan sosial politik, melainkan gerakan yang rasional dan disengaja untuk mengawali perubahan. Protes sosial dapat dikatakan sebagai gerakan sosial berskala rendah atau sebagai embrio dari gerakan sosial yang menyeluruh untuk mendorong perubahan sosial. Smelser, Charle Till dan Robert Ted Gurr

¹⁶ George A Steiner, dan John B. Minier, *Kebijakan dan Strategi Manajemen edisi Kedua*, Hlm 23.

mengatakan bahwa protes sosial memiliki beberapa tahapan, diantaranya, (1) pernyataan spontan tentang ketidakpuasan bersama; (2) pemilihan pemimpin gerakan, (3) transformasi tindakan yang berstruktur menjadi tindakan yang terorganisir; (4) konfrontasi dengan ‘musuh’ gerakan; (5) pencapaian hasil.

3. Kepemimpinan dan Resolusi Konflik

a. Kepemimpinan

Secara etimologi, kepemimpinan berarti khilafah, imamah, imaroh, yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan memimpin.¹⁷ Secara terminologi merupakan suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan.¹⁸ Pemimpin yang ideal merupakan keinginan bagi setiap orang, sebab pemimpin itulah yang akan membawa maju-mundurnya suatu organisasi, lembaga, negara dan bangsa. Oleh karenanya, pemimpin sangat dibutuhkan demi tercapainya kemaslahatan umat.

Muhadi menyebutkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak berbeda dari model kepemimpinan pada umumnya. Prinsip-prinsip dan sistem-sistem yang digunakan dalam kepemimpinan Islam memiliki beberapa kesamaan dengan kepemimpinan pada umumnya, yaitu paradigma legal formalistik yang menjelaskan kepemimpinan yang dilakukan oleh orang Islam, asas-asas yang dipakai Islam, terlepas apa dan cara memimpin itu Islami atau tidak. Paradigma yang kedua adalah

¹⁷ Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawy*, juz 1, Hlm 28.

¹⁸ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Hlm 120.

paradigma esensial-substansial yang menjelaskan mengenai kepemimpinan dapat dikatakan Islami jika di dalamnya terdapat nilai-nilai Islam yang dipraktikkan dalam mengatur sebuah organisasi atau masyarakat.¹⁹

Kata ulama adalah bentuk jamak daripada kata '*alim* dalam bahasa Arab, yang secara harfiah berarti seseorang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu, ulama berarti *men of knowledge* yaitu orang-orang yang berilmu. Di Indonesia, kata ulama yang asasnya bermakna jamak atau banyak dianggap bermakna tunggal atau seorang. Bukan hanya itu, pengertian ulama juga mengalami penyempitan makna karena kadang-kadang dianggap dan disamakan dengan seorang ahli fikih, yang tugasnya di mata orang-orang awam adalah mengurus ibadah semata dalam keseharian. Sebutan ulama di Indonesia pun juga berbeda, di Aceh disebut dengan *teungku*, di Sumatera Barat disebut *tuanku* atau *buya*, di Jawa Barat disebut dengan *ajengan*, di Jawa Tengah dan Timur dipanggil *kyai* dan lain-lain. Di Al-Qur'an sebutan ulama adalah sebagai hamba-hambanya yang dengan sesungguhnya takut kepada Allah (Q.S. Al-Fathir ayat 28).²⁰

Bagaimanapun, penguasaan terhadap ilmu-ilmu agama tidak serta merta menyebabkan seseorang dianggap sebagai seorang yang *alim*. Selain memiliki pengetahuan agama Islam, seseorang yang *alim* juga harus saleh,

¹⁹ Muhadi Zainuddin, *Studi kepemimpinan Islam; Telaah Normatif dan Historis*, (Semarang: Putra Mediatama Press, 2005), Hlm 15.

²⁰ Ahdi Makmur, *Ulama dan Pembangunan Sosial*, (Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2016), Hlm 17.

taat menjalankan ajaran agama, mengajarkan ilmunya dan berakhlak yang terpuji. Bahkan seseorang dikatakan *alim* jika diakui oleh ulama lainnya, diterima dan mendapat pengakuan daripada orang-orang di sekitarnya karena ilmu pengetahuan, kesalehan, ketaatan, sikap dan perilakunya yang sangat terpuji. Dengan demikian, ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang luas dan mendalam, berakhlak terpuji, saleh, dan taat (menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang) dan diakui oleh orang lain karena ilmu, perilaku, atau nasabnya.²¹

Dasar konseptual kepemimpinan dalam perspektif Islam adalah melalui pendekatan normatif berupa prinsip tanggung jawab dalam organisasi, prinsip etika tauhid, prinsip keadilan, dan prinsip kesederhanaan.

Kepemimpinan kyai atau ulama sering identik dengan atribut kepemimpinan yang kharismatik. Sartono menyebutkan bahwa kyai-kyai pondok pesantren baik dulu ataupun sekarang merupakan sosok yang penting yang mampu membentuk kehidupan sosial, kultural dan keagamaan warga muslim di Indonesia.²²

b. Resolusi Konflik

Menurut Weitzman, resolusi konflik memiliki makna sebagai sebuah Tindakan pemecahan masalah bersama. Lain halnya dengan Fisher, resolusi konflik yang dijelaskan adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di

²¹ Ibid., Hlm 17.

²² Sartono Kartodirjo, *Religious Movement of Java in the 19th and 20th Centuries*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1970), Hlm 114.

antara kelompok-kelompok yang berseteru. Menurut Mindes, resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.²³

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi secara sukarela. Resolusi konflik juga memberikan saran dengan cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik dalam penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak yang mampu membantu memecahkan masalah.

Berdasarkan posisi ulama terkait kontribusinya terhadap penanganan konflik Waduk Kedung Ombo, maka penulis dapat menggunakan konsep kepemimpinan ulama sebagai mediator untuk menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya dalam menghadapi kebijakan pembangunan Kedung Ombo. Mediator dapat diperankan oleh pemimpin tradisional yang membentengi titik-titik rawan dalam jalinan yang menghubungkan sistem lokal dengan sistem keseluruhan yang lebih luas; bertindak sebagai penyangga atau penengah antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan; dan menjaga terpeliharanya daya pendorong dinamika masyarakat yang diperlukan bagi

²³ Wisnu Suhardono, *Konflik dan Resolusi*, (Jakarta, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I Vol 2 No 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2015), Hlm 4.

kegiatan mereka.²⁴ Oleh karena itu, studi ini berusaha untuk melacak aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Kedung Ombo sebelum dibangunnya waduk, proses berlangsungnya pembangunan waduk dan respons masyarakat, serta kepemimpinan ulama dalam resolusi konflik kebijakan pembangunan waduk Kedung Ombo.

Sehubungan dengan analisis terhadap konflik di Waduk Kedung Ombo, perlu ditekankan bahwa yang dimaksud adalah kemunculan kepemimpinan ulama atas respons konflik di Kedung Ombo. Studi ini mengarahkan pembahasannya berdasarkan teori tentang kepemimpinan kharismatik dari Max Webber dan teori konflik dari Simon Fisher.

Menurut Ann Ruth Wilner dan Dorothy Wilner dalam suntingan Kartodirjo, istilah kharisma yang diambil dari perbendaharaan kata permulaan pengembangan agama Kristen guna menunjuk 1 dari 3 jenis kekuasaan atau *authority* yang kini merupakan klasifikasi klasiknya mengenai kekuasaan atas dasar tuntutan keabsahannya. Ia membedakan antara:

- 1) Kekuasaan tradisional, yang mana tuntutan keabsahannya didasarkan atas suatu kepercayaan yang telah ada atau *established* pada kesucian tradisi yang amat kuno;
- 2) Kekuasaan yang rasional atas berdasarkan hukum (*legal*), yang didasarkan atas kepercayaan terhadap legalitas peraturan-peraturan, dan hak bagi mereka yang memegang kedudukan, yang berkuasa berdasarkan peraturan-peraturan untuk mengeluarkan perintah-perintah; dan

²⁴ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), Hlm 158.

3) Kekuasaan kharismatik atau pribadi yang didapatkan dari pengabdian terhadap kesucian, kepahlawanan tertentu atau sifat yang patut dicontoh dari seseorang dan dari corak tata tertib yang diperlihatkan olehnya.²⁵

Dari uraian 3 jenis di atas, maka setidaknya itulah jenis yang ideal atau pengertian abstraksi tentang kekuasaan kharismatik menurut Webber, berbeda dengan kedua hal lainnya karena bersifat tidak tetap atau *stable*, meskipun terjadi lagi, dan cenderung berubah menjadi salah satu daripada kedua jenis lainnya.

Pemimpin kharismatik yang menonjol dapat dibedakan dari pemimpin-pemimpin lainnya dengan kemampuan untuk memberi semangat dan mempertahankan kesetiaan dan pengabdian terhadapnya secara pribadi, di luar dari pekerjaan atau kedudukannya. Dia dianggap memiliki kekuatan dalam bidang militer, kefanatikan agama, kecakapan menyembuhkan, kepahlawanan atau dalam dimensi yang lain. Seperti yang ditekankan oleh Webber, bahwa titik beratnya bukanlah pada siapa pemimpin tersebut, akan tetapi bagaimana ia ditanggapi oleh mereka yang di bawah kekuasaannya atau sekelilingnya, dan inilah yang menentukan berlakunya kharisma tersebut. Kharismanya terkandung pada persepsi-persepsi rakyat dan orang yang berada di sekelilingnya. Menurutnya, kemampuan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang sekiranya dapat membantu munculnya kepemimpinan kharismatik di suatu negara. Kemudian hal tersebut akan mampu menjelaskan bagaimana pemimpin kharismatik tersebut timbul dan mendapat pengakuan. Pada

²⁵ Sartono Kartodirjo, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1984), Hlm 166.

akhirnya, penilaian terhadap fungsi-fungsi serta kepemimpinan kharismatik tersebut dalam bentuk perubahan-perubahan yang lazim dalam artiannya mengenai “pembangunan”.

Teori kepemimpinan kharismatik oleh Max Webber, relevan dengan tipe dan daya tarik kharisma seorang pemimpin dalam proses resolusi konflik. Keselarasan teori dengan beberapa elemen yang menjadi sebab aspek *factual historis* di dalam penelitian tesis ini, yakni:

1. Kemunculan kepemimpinan kharismatik didasarkan oleh situasi mendesak, namun juga ditekankan pada aspek murni yakni kebiasaan dari individu.
2. Sumber pengesahan pemimpin kharismatik terletak pada gambaran keadaan yang memperlihatkan bagaimana kehidupannya dan apa yang dipertahankan, selain itu validitas kharisma terletak pada interaksi antara pemimpin dan sekelilingnya.
3. Kemunculan ulama telah memberikan dampak dalam proses resolusi konflik.
4. Daya tarik ulama dalam menampung berbagai keluhan dan mengarahkan penduduk Kedung Ombo dalam mengubah persepsi konflik yang berkembang.
5. Sebagai suatu keharusan, pemimpin kharismatik memusatkan perhatian pada aspek keutuhan tanpa perpecahan, mempersatukan, memperhitungkan untung dan rugi.

6. Mimbar internasional dapat dipergunakan oleh pemimpin kharismatik sebagai suatu hal yang sangat berarti dalam pembentuk suatu kepribadian atau identitas nasional.
7. Kepemimpinan kharismatik memungkinkan banyak hal yang membantu konsolidasi, penggunaannya dapat pula memperlambat kelembagaan dan komunitas kekuasaan yang diperlukan bagi tugas-tugas pembangunan yang nyata.

Simon Fisher menyebutkan bahwa konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Ia juga berpendapat bahwa konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu, contohnya kesenjangan, status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tak seimbang sehingga menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kejahatan. Konflik dapat dikelola dengan menggunakan beberapa pendekatan, yang salah satunya menggunakan resolusi konflik.²⁶

Dalam penelitian ini, resolusi konflik relevan dengan realitas sejarah yang ada, sehingga akan mampu menguraikan temuan fakta sejarah. Resolusi konflik mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan (penyelesaian konflik), namun juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya.

²⁶ Simon Fisher dkk, *Terj. Mengelola Konflik...* Hlm 7.

Teori konflik oleh Simon Fisher juga relevan dengan bentuk konflik dan pendekatan mengelola konflik. Teori tersebut juga selaras dengan beberapa aspek fakta historis, beberapa diantaranya yaitu:

1. Penyebab konflik disebabkan pada masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi.
2. Dalam mengelola konflik, dibutuhkan resolusi konflik yang mengacu pada strategi penanganan konflik dan ingin dicapainya resolusi berbagai perbedaan yang menjadi asal penyebab konflik.
3. Dalam penyusunan pengelolaan strategi konflik, terdapat bantuan dan konflik sehingga analisis mengenai dampak program bantuan dan pembangunan dalam konflik bisa diuraikan.
4. Dalam memengaruhi kebijakan, terdapat beberapa LSM, ulama, mahasiswa, paguyuban, lembaga bantuan hukum dan beberapa kelompok-kelompok yang berusaha mengatasi konflik.
5. Dari segi tindakan dalam pengelolaan konflik, mayoritas mengelola konflik secara langsung, seperti upaya pencegahan, mempertahankan kehadiran, memungkinkan penyelesaian.
6. Ulama menggunakan *peace keeping* (menghentikan kekerasan yang dilakukan), *peace making* (menciptakan perdamaian), dan *peace building* (membina perdamaian agar bisa bertahan dalam jangka panjang) sebagai bentuk upaya resolusi konflik di Kedung Ombo

F. Metode Penelitian

Penelitian sejarah sosial ini menggunakan metode kualitatif yang bertumpu pada studi lapangan dengan teknik penyajian data serta penulisan yang bersifat deskriptif dan analisis, dan studi pustaka atau *library research*. Tahapan heuristik dilakukan sebagai bentuk usaha untuk memberikan sudut pandang lebih luas bagi peneliti dalam menguji validitas fakta-fakta baru yang ditemukan. Data dan atau sumber yang sesuai dengan latar belakang peristiwa sejarah peristiwa pembangunan Kedung Ombo, diproses dan dikaji kembali dalam penelitian yang akan memperoleh pandangan secara lebih rinci mengenai keberadaan kepemimpinan ulama dalam pokok persoalan.²⁷

Tahapan verifikasi atau kritik sumber mendorong peneliti agar mampu membangun peristiwa sejarah yang relevan dengan topik pembahasan dan objek materiil penelitian. Aplikasi kritik pada sumber-sumber yang tergolong pada sumber pustaka dilakukan agar mendapatkan keabsahan sumber (*library research*).²⁸ Beberapa sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dokumen berupa surat kabar, koran, majalah, sumber lisan (*oral source*). Proses uji kualitas dan kesesuaian sumber dengan topik pembahasan dilakukan dengan melakukan perbandingan terkait sumber-sumber yang digunakan. Menurut Gottscalk, generalisir sumber-sumber data historis melalui kajian pustaka digunakan sebagai proses perbandingan untuk menguji

²⁷ Ibid., Hlm 55.

²⁸ L.J. Moleonsg, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Hlm 17.

dan menganalisa sumber data yang otentik dan dipercaya.²⁹ Kritik sumber secara internal dan eksternal dilakukan dengan beriringan dalam proses pengumpulan data. Kedua kritik ini diberlakukan dalam seleksi informan saat pengumpulan data melalui metode wawancara. Kelangkaan sumber tertulis yang dapat memberikan informasi lebih banyak tentang objek penelitian mengharuskan peneliti untuk menempuh metode wawancara secara mendalam kepada para saksi sejarah dan tokoh-tokoh masyarakat Kedung Ombo.³⁰ Beberapa informan dikelompokkan menjadi 3, yakni tokoh lokal Kedung Ombo, keluarga ulama, dan pihak luar yang menjadi saksi sejarah dalam keikutsertaannya dalam dinamika peristiwa Kedung Ombo. Melalui kritik intern terhadap fakta-fakta sejarah yang peneliti temukan dari sumber primer dan sumber sekunder, akan membantu dalam hal penemuan fakta. Akurasi temuan sumber dan kualitas data yang sesuai dengan studi pustaka serta hasil interview akan mampu memenuhi standar nilai sebagai bagian dari penelitian karya ilmiah.³¹

Pentingnya tahapan tersebut dalam memperoleh fenomena atau gejala sosial akan mampu mengungkap peristiwa sejarah secara komprehensif. Penggunaan ilmu bantu sosiologi juga memberikan dampak terkait kepemimpinan seorang ulama atau kyai dalam hal status sosialnya di kehidupan masyarakat. Selain itu, konflik yang berkembang di tengah pembangunan waduk Kedung Ombo tak lain adalah adanya kepentingan dalam

²⁹ Louis Gottscalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm 32.

³⁰ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Hlm 166.

³¹ L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Hlm 17.

jangka panjang menurut pemangku kebijakan yang mana hal tersebut ternyata berdampak kepada keberlangsungan hidup warga sekitar Kedung Ombo. Kepemimpinan seorang ulama kemudian hadir dalam lingkaran konflik yang secara tiba-tiba atau secara refleks keberadaan tokoh tersebut ikut andil dalam sebuah dinamika konflik. Sebagai hipotesa sementara, terkait dengan bukti-bukti sejarah dalam kepemimpinan ulama di Kedung Ombo diyakini memberikan efek atau dampak yang berlangsung dalam konflik tersebut. Sebagai contoh bahwa (mungkin) kepercayaan masyarakat terhadap sesosok ulama akan mampu memberikan dampak terhadap konflik yang tak kunjung selesai.

Setelah data terkumpul, interpretasi sejarah dilakukan sebagai tahapan ketiga. Proses interpretasi atau analisis data dilakukan dengan cara sintesis fakta-fakta yang diperoleh melalui eksplanasi sejarah. Beberapa data yang telah dikumpulkan, mekanisme interpretasi dilangsungkan terhadap data tersebut yang berupa data dokumenter, hasil wawancara dan observasi, berdasarkan kategori masalah yang mengacu pada kerangka teori penelitian.³² Fakta-fakta sejarah selanjutnya dikategorikan sesuai dengan tipe kepemimpinan Ulama dan upaya resolusi konflik dalam konteks pembangunan waduk Kedung Ombo. Kategorisasi fakta ini juga memperlihatkan inti sari historiografi pada penguraian logis atau hubungan kausalitas guna mendukung pementapan kesimpulan. Oleh karena itu, penjelasan sejarah dalam tesis ini adalah suatu bentuk kesatuan pembahasan yang sistematis.

³² Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Hlm 168.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dari penelitian ini akan disusun menjadi lima bab yang berkaitan dan saling mendukung antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I membahas mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan aktivitas sosial keagamaan masyarakat sekitar Waduk Kedung Ombo sebelum dibangunnya waduk. Bagian ini juga akan membahas mengenai tentang kondisi demografi, mata pencaharian, dan sistem kepercayaan masyarakat sekitar waduk Kedung Ombo.

BAB III fokus pembahasan mengenai proses pembangunan waduk Kedung Ombo dan juga respons masyarakat setempat atas kebijakan tersebut. Dalam bagian ini juga akan membahas mengenai terjadinya konflik antara warga terdampak dengan pemangku kebijakan dan dinamika konflik yang terjadi.

BAB IV menjelaskan secara objektif mengenai keterlibatan ulama dalam proses resolusi konflik seputar pembangunan waduk Kedung Ombo. Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai kepemimpinan ulama yang ikut serta dalam proses resolusi konflik dan kontribusi Ulama dalam menjalankan fungsi dari kepemimpinannya.

BAB V menguraikan hasil penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah yang telah

dituliskan pada awal penelitian yang bersifat problematik, sehingga dapat menjawab apa yang diteliti. Saran merupakan hasil dari proses penelitian berupa masukan, anjuran, atau kritik yang membangun sehingga mampu memberikan respons positif terhadap suatu karya penelitian sejarah. Saran akademik juga diperlukan agar penelitian tentang objek ulama dan Kedung Ombo dapat melengkapi penelitian ini.

H. Jadwal Penelitian

Penelitian yang dijadwalkan oleh peneliti dibagi menjadi beberapa tahap, yakni:

1. Tahap Pertama, dilakukan dari Agustus-Desember 2021 dan Januari-Maret 2022 terkait agenda penelusuran informasi berupa Narasumber, Informan dan Sumber Referensi. Tahap ini merupakan tahap awal yang berfungsi sebagai penelusuran ketersediaan buku, koran, jurnal hingga *contac person* saksi terkait dengan cara pelacakan media, jaringan pertemanan atau jaringan organisasi yang sekiranya dapat diakses.
2. Tahap Kedua, dilakukan dari Maret-Oktober 2022 berupa Interview dengan Narasumber dan Informan yang telah dipilih sesuai ketersediaan informasi dan data. Tahap ini dilakukan melalui berbagai cara, yakni dengan terjun ke lapangan penelitian di daerah Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Solo, Yogyakarta, lokasi sekitar Waduk Kedung Ombo dan melalui kontak media sosial/pribadi (*online meet*).

3. Tahap Ketiga, dilakukan di antara kurun waktu bulan Juli-November 2022 berupa penulisan dan olah data meliputi seluruh data lisan dan atau non lisan hingga penyelesaian rangkaian penelitian tesis.

Pada saat melakukan penelitian, terdapat hambatan teknis dan non teknis. Penyebab hambatan yang telah dievaluasi ialah karena adanya kejadian atau hambatan yang tidak terduga. Sehingga sering terjadi agenda diluar dari jadwal yang telah direncanakan oleh peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, kondisi warga sekitar Kedung Ombo berkaitan dengan keadaan ekonomi, sosial budaya, pendidikan keagamaan masih memegang nilai-nilai yang berada dalam masyarakat pedesaan. Pada masa sebelum pembangunan Kedung Ombo, masyarakat rata-rata berprofesi sebagai petani. Kondisi pendidikan di sekitar Kedung Ombo juga dapat dikatakan rendah, mengingat masih adanya buta huruf di tahun 1987, akan tetapi sejak 1987 juga di daerah Kemusu bebas dari buta aksara, buta angka dan bahasa Indonesia. Berkaitan dengan keagamaan, masyarakat di sekitar Kedung Ombo adalah muslim.

Pelaksanaan tradisi Jawa terkait dengan upacara dan ritual masih dilakukan dengan sistem penanggalan Jawa sebagai acuan kegiatan tertentu. Tidak hanya ritual dan tradisi, warga sekitar Kedung Ombo juga masih mempercayai mitologi yang bersumber dari leluhur-leluhurnya, kebanyakan berisi mengenai nasihat hidup dan berkaitan tentang zaman kemakmuran. Kepercayaan ini begitu melekat, karena tetap dijaga dan dipeliharanya dongeng mengenai kepahlawanan dan *piweling* yang kemudian diinterpretasikan oleh sebagian warga Kedung Ombo dalam melawan kebijakan pembangunan Waduk Kedung Ombo.

Kedua, Pembangunan Waduk Kedung Ombo didasarkan atas beberapa permasalahan terkait ketersediaan air, kualitas air minum, pengendalian banjir

serta dorongan pengembangan sungai Jratunseluna untuk kepentingan nasional secara ekonomi dan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah proyek. Pembangunan Waduk Kedung Ombo meliputi 3 Kabupaten (Boyolali, Sragen, Grobogan), 5 Kecamatan, dan 33 desa dengan sebanyak 5.268 KK. Proses pembangunan dilakukan secara 4 tahap, yakni tahap sosialisasi, tahap pembebasan tanah, tahap pembangunan fisik, dan tahap peresmian.

Terjadinya konflik pembangunan Waduk Kedung Ombo disebabkan oleh pendekatan dari mulai sosialisasi oleh tim Pembebasan Tanah yang dianggap oleh warga menyimpang dari unsur musyawarah mufakat. Setelahnya, warga yang minim informasi justru menolak untuk didata tanahnya karena dari awal sosialisasi sudah terdapat kejanggalan dalam prosesnya. Pemerintah setempat dan tim pembebasan tanah melakukan tindakan yang di luar batas seperti pemaksaan, ancaman, dan pemberian ganti rugi yang kecil tanpa adanya musyawarah. Alhasil warga melakukan perlawanan seperti aksi tidak menerima ganti rugi, dan memilih bertahan di tanah kelahirannya.

Pemerintah setempat juga tidak melakukan sikap yang diinginkan oleh warga, yakni secara musyawarah mufakat. Ditambah dengan adanya kebijakan relokasi dan transmigrasi tanpa adanya persetujuan, warga menjadi seakan-akan terusir dari tanah kelahirannya.

Ketiga, konflik yang kemudian menjadi isu nasional bahkan internasional ini mengakibatkan berbagai kalangan menunjukkan dukungan dan kepeduliannya. LSM, mahasiswa, ulama, akademisi dan tokoh-tokoh lainnya

telah menunjukkan sikap tentang dampak dari pembangunan waduk Kedung Ombo. Kasus Kedung Ombo memang telah melibatkan banyak unsur dalam hal penanganannya. Ulama berkontribusi dalam hal resolusi konflik antara pemangku kebijakan dan warga terdampak pembangunan Kedung Ombo. Hal ini dikarenakan faktor relasi dan interaksi dari mahasiswa, LSM, tokoh agama lintas iman dengan K.H. Hammam Dja'far, K.H. Mahfudz Ridwan, dan K.H. Abdurrahman Wahid. Relasi tersebut memberikan informasi seputar dampak yang dirasakan warga terdampak Kedung Ombo, sehingga memunculkan sikap solidaritas untuk membantu orang lemah. Berdasarkan informasi tersebut, penggalangan solidaritas sosial menjadi alasan ulama berkontribusi dalam resolusi konflik pembangunan waduk Kedung Ombo. Dibutuhkannya seseorang yang bersedia mendampingi dan membela hak-hak warga terdampak pembangunan Waduk Kedung Ombo menjadi faktor ulama berperan dalam memberikan edukasi dan advokasi di Kedung Ombo.

Selain itu, terdapat alasan hukum, keadilan yang belum dirasakan oleh rakyat, persoalan hak asasi manusia, alasan politik dan kesewenang-wenangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan Orde Baru sehingga dikritik oleh ulama-ulama. Kontribusi ulama dalam resolusi konflik tergambarkan dalam tiga proses, yakni proses penciptaan perdamaian oleh ketiga ulama, proses penggalangan perdamaian oleh K.H. Hammam Dja'far dan K.H. Abdurrahman Wahid, dan proses membina perdamaian melalui K.H. Mahfudz Ridwan dan K.H. Abdurrahman Wahid. Ketiga ulama menggunakan cara dan pendekatan yang berbeda dalam resolusi konflik di Kedung Ombo.

Kepemimpinan kharismatik dari ketiga ulama di atas memperlihatkan bahwa fungsi kepemimpinan dari Max Webber telah diterapkan. Identifikasi mengenai kepemimpinan kharismatik ulama tercermin dari adanya fungsi mobilisasi untuk mendorong terjadinya perubahan dari sisi sikap warga Kedung Ombo; fungsi mediasi untuk menangani konflik dan ketegangan antar pihak secara langsung; serta fungsi motivasi dari ketiga ulama yang memiliki konsentrasi terhadap keadaan pendampingan masyarakat, penguatan psikologis warga terkena dampak pembangunan Kedung Ombo serta keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Upaya dari tiap ulama menunjukkan adanya resolusi konflik karena berdampak dari segi sikap warga terhadap kemandiriannya serta keputusan relokasi melalui pendekatan dari beberapa ulama maupun pihak lain seperti LSM, dan gubernur Mardiyanto.

Faktor yang membentuk tipe kepemimpinan menurut Max Webber dalam penjelasan teori kharismatik adalah faktor *intern* berupa penekanan pada aspek murni kebiasaan dari individu, dan faktor *ekstern* berupa konsistensinya terhadap aspek keutuhan tanpa perpecahan, mempersatukan dan memperhitungkan untung dan rugi. Ketiga ulama telah terbiasa melakukan edukasi dan advokasi kepada masyarakat ketika terdapat problem sosial. Aspek mempertahankan keutuhan tanpa perpecahan, mempersatukan, memperhitungkan untung rugi tergambar ketika ketiga ulama menjalankan penggalangan solidaritas sosial dalam proses resolusi konflik di Kedung Ombo.

B. Saran

Penulisan Tesis yang berjudul “Kepemimpinan Ulama dalam Resolusi Konflik Pembangunan Waduk Kedung Ombo Tahun 1985-2002” masih jauh dari kata sempurna. Beberapa data dan temuan sumber masih belum lengkap seluruhnya. Oleh sebab itu, peneliti berharap adanya masukan, tanggapan dan informasi yang lebih luas tentang ulama maupun pembangunan Kedung Ombo. Peneliti berharap akan adanya penelitian lanjutan yang mampu melengkapi penelitian ini. Dengan objek penelitian yang sama, namun pendekatan dan perspektif yang berbeda akan mendapatkan informasi dan data yang lebih lengkap sehingga mampu menyajikan hasil penelitian yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- Asfinawati dkk. *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia 2009*, Jakarta: IDSPS, 2009.
- Bachrawi, Sanusi. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Barton, Greg. *Terj. Biografi Gus Dur*, Yogyakarta: Noktah, 2019.
- Fisher, Simon, dkk. *Terj. Mengelola Konflik 'Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council Indonesia, 2001.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Penerbit Pustaka Jaya, 1989.
- Gottscalk, Louis. *Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Handayono, Eko. *Sosiologi Politik*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Hefner. Robert W. *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- Isdiyanto dkk. *Menyelami Kedung Ombo-Investigasi Wartawan*, Kelompok Diskusi Wartawan Jawa Tengah, 2003.
- Kartodirjo, Sartono. *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.

- Kartodirjo, Sartono. *Religious Movement of Java in the 19th and 20th Centuries*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1970.
- Kuntowijoyo. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
- Makmur, Ahdi. *Ulama dan Pembangunan Sosial*, Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2016.
- Moleong L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mujib, Abdul. *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nusantara, Abdul Hakim G. & Budiman Tanuredjo. *Dua Kado Hakim Agung Buat Kedung Ombo-Tinjauan Putusan-putusan Mahkamah Agung tentang Kasus Kedung Ombo*, Jakarta: ELSAM, 1997.
- Pakpahan, Mochtar. *Menarik Pelajaran dari Kedung Ombo*, Jakarta: Forum Adil Sejahtera, 1989.
- Stanley. *Seputar Kedung Ombo*, Jakarta: ELSAM, 1994.
- Steiner, George A. & John B. Minier. *Kebijakan dan Strategi Manajemen edisi Kedua*, Jakarta: Eirlangga, 1997.
- Subakir, Ahmad. *Relasi Kiai dan Kekuasaan: Menguak Relasi Kiai dan Pemerintah Daerah dalam Politik Lokal*, Kediri: STAIN Kediri Press, 2018.
- Sugiarto, Agus Dodi. *Memoar Aktivis LSM*, Yogyakarta: Surakarta Writers, 2022.
- Suyami. *Kajian Nilai Budi Pekerti dalam Serat Jayabaya*, Yogyakarta: BPNB, 2015.
- Usman, Sunyoto. *Sosiologi "Sejarah, Teori, dan Metodologi"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Zainuddin, Muhadi. *Studi kepemimpinan Islam; Telaah Normatif dan Historis*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2005.

B. DISERTASI

Aditjondro, George. "The Media as Development Textbook-A Case Study on Information Distortion in Debate about the Social Impact of an Indonesian Dam", *Disertasi*, New York: Cornell University, (1993).

C. JURNAL

Agnesia, Ruth, dkk. "Relasi Elite, Sub Elite dan Masyarakat Desa dalam Mempertahankan Dinasti Keluarga Masra di Desa Gapurana Kabupaten Sumenep", Malang: Jurnal Society Vol. 9.2, (2021).

Garnis Sasmita, Gusti, dkk. "Humanisme dalam Serat Jangka Jayabaya Perspektif Javanese Wordview", Surakarta: Jurnal Studi Agama-agama Vol. 8 No.1, (2018).

Isdiyanto, et.al. "Menyelami Kedung Ombo", Semarang: Kelompok Diskusi Wartawan, vol.1 (2003).

Jannah, Hannatul. "Kyai, Perubahan Sosial dan Dinamika Politik Kekuasaani", Pamekasan: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan (2015).

Lesmanawati, Suri dkk. "Resolusi Konflik Pembebasan Lahan Pertanian untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, Majalengka, Bogor: Universitas Pertahanan.

Muchtarom, Zaini. "Konsep Max Webber tentang Kepemimpinan Kharismatik", Jurnal Refleksi Volume II Nomor 3, (2000).

Sri Y, Devi. "Mengenal Tradisi Menyambut Bulan Ramadhan", Salatiga: Jurnal Sosial Budaya UIN Salatiga vol 19, (2022).

Suhardono, Wisnu. “Konflik dan Resolusi”, Jakarta, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I Vol 2 No 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta (2015).

Yudari, A.A Kade Sri. “Ratu Adil Satria Piningit dan Zaman Edan: Wacana Futurologi dalam Serat Kalatidha”, Denpasar: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol. 21, (2021).

Zainuddin, Denny. “Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan di Sumatera Utara dan Jawa Tengah”, Jakarta: Jurnal Hak Asasi Manusia Vol 7 No.1, (2016).

D. KORAN

BERNAS

“Kyai Tempat Mengadu” [Berita], Bernas, 7 Maret 1992.

JATENG POS

“Warga Kedung Ombo Minta Ketua MA Diganti” [Berita], Jateng Pos, 27 Januari 2000.

JAWA POS

“Waduk Kedung Ombo di Boyolali Proyek Besar akan Habiskan Biaya Sebesar Rp 200 Milyar” [Berita], Jawa Pos, 24 Februari 1987.

“Kelompok Rama Mangun Bertemu Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah” [Berita], Jawa Pos, 12 April 1989.

“Minggu Depan, Kedung Ombo Ditinggalkan Penduduknya” [Berita], Jawa Pos, 13 Mei 1989.

“Warga Kedung Ombo akan Syukuran di Perumahan Baru” [Berita], Jawa Pos, 29 Mei 1989.

“ICMI Jajaki Kemungkinan Bantu Soal Kedung Ombo” [Berita], Jawa Pos, 7 Maret 1991.

“MA Menangkan Warga Kedung Ombo: Ganti Rugi dari Rp 250 menjadi Rp 50.000” [Berita], Jawa Pos, 7 Juli 1994.

“Mendagri Akan Melakukan Dialog dengan Tokoh LSM” [Berita], Jawa Pos, 10 Agustus 1989.

“Warga Kedung Ombo Minta Ketua MA Diganti” [Berita], Jateng Pos, 27 Januari 2000.

KEDAULATAN RAKYAT

“Pembebasan Tanah Waduk Kedung Ombo Diselesaikan Secara Lintas Sektoral” [Berita], Kedaulatan Rakyat, 28 November 1987.

“Buntut Kemenangan Gugatan 34 Warga Kedung Ombo: ratusan KK Berniat Ajukan Gugatan Baru” [Berita], Kedaulatan Rakyat, 26 Juli 1994.

“Kyai Hammam Gabung Rama Mangunwijaya Mengentaskan Anak Kedung Ombo” [Berita], Kedaulatan Rakyat, 10 Maret 1989.

“Kami Ingin Selamatkan Orang Lemah” [Berita], Kedaulatan Rakyat, 16 Maret 1989.

“Rama Mangun Jamin Sumbangan Pasti Sampai Kepada yang Berhak” [Berita], Kedaulatan Rakyat, 17 Maret 1989.

“K.H. Hammam Dja'far: Posisi Saya dan Rama Mangunwijaya Bagaikan Palang Merah” [Berita], Kedaulatan Rakyat, 18 Maret 1989.

“Pak Harto di PLTA Panglima Besar Soedirman” [Berita], Kedaulatan Rakyat, 25 Maret 1989.

“Sudah Ditransmigrasikan 4.257 KK Warga Kedung Ombo” [Berita], Kedaulatan Rakyat, 4 April 1989.

“Kelompok Rama Mangun Bertemu Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah” [Berita], Kedaulatan Rakyat, 12 April 1989.

“Sejumlah Cendekiawan Bentuk Forum Demokrasi” [Berita], Kedaulatan Rakyat, 4 April 1991.

“Menjelang Peresmian Waduk Kedung Ombo (1) Kami Merasa Senang [Berita], Kedaulatan Rakyat, 16 Mei 1991.

“Kedung Ombo Ladang Rejeki” [Berita], Kedaulatan Rakyat, 21 Mei 1990.

KOMPAS

“Kedung Ombo Hari Ini: Sebagian Penduduk Mau Pindah Bila Air Tiba” [Berita], Kompas, 14 Januari 1989.

“Belum Dijadwalkan, Pertemuan Mangunwijaya dengan Gubernur Ismail” [Berita], Kompas, 6 Maret 1989.

“Rektor Universitas Muhammadiyah Malang: Penolakan Izin Mangunwijaya Tak Sesuai Solidaritas Sosial” [Berita], Kompas, 14 Maret 1989.

“Kedung Ombo Tertutup bagi Kegiatan Bakti Sosial” [Berita], Kompas, 15 Maret 1989.

“Menko Kesra tentang Kedung Ombo: Jangan Berikan Bantuan pada Penduduk yang Tak Mau Pindah” [Berita], Kompas, 17 Maret 1989.

“Mereka yang Tersisa di Kedung Ombo” [Berita], Kompas, 21 Maret 1989.

“Mungkin Ada Sisa PKI di Kedung Ombo yang Memberikan Penerangan Tidak Benar” [Berita], Kompas, 25 Maret 1989.

“Gubernur Ismail: Penduduk Kedung Ombo Boleh Menempati Tanah Perhutani [Berita], Kompas, 30 Maret 1989.

“Kedungmulyo, Nama Pemukiman Baru Warga Kedung Ombo” [Berita], Kompas, 1 Juni 1989.

“LSM Hanya Mau Memberi Masukan Komplementer” [Berita], Kompas, 9 Agustus 1989.

SUARA MERDEKA

“Ganti Rugi Waduk Kedung Ombo Selesai dan Tidak Ada Masalah” [Berita],
Suara Merdeka, 15 Februari 1988.

“Saya akan Minta Restu untuk Tangani Anak-anak Kedung Ombo” [Berita],
Suara Merdeka, 28 Februari 1989.

“Elevasi Air Kedung Ombo Mendadak Melonjak Tinggi” [Berita], Suara
Merdeka, 14 Maret 1989.

“Kawasan Genangan Kedung Ombo Tertutup untuk Bakti Sosial” [Berita], Suara
Merdeka, 15 Maret 1989.

“ICMI Tak Perlu Cari Data Sendiri ke Kedung Ombo” [Berita], Suara Merdeka,
21 Maret 1991.

“Gus Dur: Mereka Dipaksa Menerima, Warga Diminta Tidak Emosional”
[Berita], Suara Merdeka, 5 April 2000.

“Mengikuti Transmigrasi Kedung Ombo (1) Hidup Disini dan di Boyolali Sama
Saja” [Berita], Suara Merdeka, 11 April 1989.

“Tanah Air Baru” [Berita], Suara Merdeka, 11 April 1989.

“Mengikuti Transmigrasi Kedung Ombo (2) Tidak Peduli Resiko Ketemu
Harimau” [Berita], Suara Merdeka, 12 April 1989.

“Mengikuti Transmigrasi Kedung Ombo (3) Kami Butuh Gamelan dan Pakaian
Ketoprak” [Berita], Suara Merdeka, 13 April 1989.

“MUI Jawa Tengah akan Mengkoordinasikan Bantuan Sosial Ramadhan Kedung
Ombo” [Berita], Suara Merdeka, 13 April 1989.

“Baru 47 Orang Bersedia Terima Ganti Rugi Waduk Kedung Ombo” [Berita],
Suara Merdeka, 15 Desember 1988, Hlm 3.

SUARA PEMBARUAN

“Menko Kesra Meminta Masalah Kedung Ombo Jangan Dibolak-balik” [Berita],
Suara Pembaruan, 17 Maret 1989.

“Mungkin Ada Sisa PKI di Kedung Ombo” [Berita], Suara Pembaruan, 25 Maret 1989.

“Penduduk Kedung Ombo Minta Oknum Penjaga Pos Ditindak” [Berita], Suara Pembaruan, 25 Maret 1989.

TEMPO

“Dari pada Lari Sana Lari Sini” [Berita], Laporan Utama Tempo, 25 Maret 1989.

“Menunggu Sang Air Menyentuh” [Berita], Laporan Utama Tempo, 25 Maret 1989.

WAWASAN

“Terputus, Jalan Menuju ke Kedung Ombo dari Kecamatan Kemusu, Tergenang Air Waduk” [Berita], Wawasan, 21 Januari 1989.

“Kasus Sabotase Ganti Rugi Kedung Ombo: Uang Ratusan Juta Rupiah yang Diselewengkan akan Dikembalikan” [Berita], Wawasan, 25 Februari 1989.

“Kassospol ABRI Letjen Harsudiono Hartas: Tak Ada Larangan ke Kedung Ombo Selama untuk Kepentingan Sosial” [Berita], Wawasan, 1 Maret 1989.

“Mendagri Rudini: Wewenang Soal Kedung Ombo Ada pada Gubernur Jateng” [Berita], Wawasan, 14 Maret 1989.

“Bagi Penduduk Kedung Ombo, Disediakan Fasilitas untuk Transmigrasi ke Bengkulu” [Berita], Wawasan, 1 April 1989.

“Waduk Kedung Ombo akan Berfungsi Pertengahan April [Berita], Wawasan, 1 April 1989.

“Penyelesaian Waduk Kedung Ombo Diserahkan pada Gubernur Jateng” [Berita], Wawasan, 11 April, 1989.

“Rp 2 Milyar Bantuan Presiden untuk Transmigran Kedung Ombo” [Berita], Wawasan, 22 April 1989.

“Warga Kedung Ombo yang Masih Bertahan Segera Tempati Lokasi Milik Perhutani” [Berita], Wawasan, 12 Mei 1989.

“Kedung Ombo, Antara Harapan dan Kenangan (1) Sebelum Akhirnya Mereka Harus Menyerah [Berita], Wawasan, 29 Mei 1989.

“Dengan Sajian ‘Joko Tingkir’, Petang Ini Gubernur Beri Tenger Pemukiman Baru Warga Kedung Ombo” [Berita], Wawasan, 30 Mei 1989.

“Kedung Ombo, Antara Harapan dan Kenangan (2) Mereka Masih Harus Bertahan untuk Hari Esok” [Berita], Wawasan, 30 Mei 1989.

E. LAPORAN PENELITIAN

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Jaringan Informasi Masyarakat. “Laporan Kasus ‘Cases Report’”, Jakarta: YLBHI dan JARIM, Vol. 2 Juni 1991.

KKN-PPM UGM 2020. “Mengenal Tradisi Nyadran di Purworejo”, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2020.

Wahyono, Effendi. “Stratifikasi Sosial pada Masyarakat Pedesaan di Jawa Abad ke-19”, Seminar Nasional Riset Inovatif, 2017.

Najmuddin, Muhammad dkk. Inisiatif Perdamaian dan Resolusi Konflik Secara Damai di Jawa Tengah, Laporan Field Trip Pesantren for Piece, 2015.

F. MAJALAH

Majalah Konstitusi Edisi 94 Februari 2015.

G. SKRIPSI

Setyawan Noviandi, Ardhi. “Dampak Pembangunan Waduk Kedung Ombo terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani di Kabupaten Grobogan Tahun 1989-1998”, *Skripsi*, Semarang: Unnes, (2019).

Santoso, Eko. “Melawan Genangan Air: Resistensi Warga Kemusu terhadap Pembangunan Waduk Kedung Ombo”, *Skripsi*, Semarang: UNNES, (2019).

H. TESIS

Riadi, Ach. “Kiai dan Perubahan Sosial di Madura 1935-1955”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2022).

Mardimin, J. “Perlawanan Masyarakat Kedung Ombo” Studi tentang Bentuk-bentuk Resistensi Masyarakat Kedung Ombo terhadap Represi Negara atas Pembangunan Waduk Kedung Ombo”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, (2004).

Dhbi Salam, Panis. “Bedhahing Serang Kaping Telu Ing Kedungpring-Gerakan Sosial Masyarakat Seputar Kedung Ombo 1985-2002”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, (2016).

I. WAWANCARA

Agus Dodi, Interaksi LSM dan Mahasiswa di Kedung Ombo, 17 Agustus 2022.

A.S Burhan, Gerakan Mahasiswa Islam di Yogyakarta dalam Kasus Kedung Ombo, 29 Oktober 2022

Bahudin, Jaringan LSM Kiai Mahfudz Ridwan, 9 Juli 2022.

Didik Wahyudiono, Kegagalan LSM di Kedung Ombo & Jaringan Ulama Seputar Kedung Ombo, 18 Agustus 2022.

Dr. Ahmad Suaedy M.A. Hum, Gus Dur dan Sikap Pembangunan di Orde Baru,
20 Oktober 2022

J. Mardimin, Perlawanan Masyarakat Kedung Ombo dan Persentuhan Ulama, 10
Agustus 2022.

Johny Nelson Simanjuntak, Gus Dur dan Kiai Mahfud dalam Kesaksiannya, 6
Agustus 2022.

K.H. Imam Aziz, Keberanian K.H. Hammam Dja'far, 9 Oktober 2022

M. Abdul Rochim, Jaringan Advokasi LSM di Salatiga, 7 Agustus 2022.

M. Zayinul Arif, Mahasiswa KSKPKO dan Interaksi K.H. Mahfudz Ridwan, 8
Juli 2022.

Maria Pakpahan, Gus Dur Dinamikanya dalam Advokasi dan Penegakan HAM,
11 September 2022

Syauqi, K.H. Mahfudz Ridwan Advokasi di Kedung Ombo, 5 Juli 2022.

Zoemrotin KS, Gus Dur dan INFID dalam Kasus Kedung Ombo, 25 Oktober
2022

J. WEBSITE

Alif.id/Mengenal Tradisi Apitan di Masyarakat Jawa oleh Hamidulloh Ibd

Aziz Firdausi, Fadrik, "Gus Dur Jadi Oposisi Soeharto sambil Menentang
Sektarianisme Agama" Diakses melalui website pada 27 November 2022,
<https://tirto.id/gus-dur-jadi-oposisi-soeharto-sambil-menentang-sektarianisme-agama-epEr?page=all#secondpage>.

Diakses melalui website <https://www.edimancoro.or.id/category/sejarah> pada 2
November 2022 di Salatiga.

Diakses melalui website <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4003691/mengenang-kiai-mahfud-ridwan-yang-dikenal-ngayomi-semua-orang>

Nelson Simanjuntak, Johny. "Membela Kurban Pembangunan Waduk Kedung Ombo",
Diakses melalui website pada 15 November 2022, www.elsam.or.id

Romo Y. Suyatno Hadiatmojo, “Kepedulian Gus Dur pada Masyarakat Pengungsi Kedung Ombo”, (2010), Diakses melalui website pada 20 November 2022 di Salatiga, <https://way4x.wordpress.com/kyai-abdurahman-wahid/prestasi-gusdur-selama-menjabat-jadi-presiden/kepedulian-gusdur-pada-masyarakat-pengungsi-kedung-ombo>.

K. LAIN-LAIN

Aplikasi Google Maps.

Aplikasi Whatsapp.

Aplikasi Youtube.

Aplikasi Zoom.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA